

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi idealnya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, karena indikator pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan Pendapatan Domestik Bruto suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya paralel dengan pertumbuhan ekonomi setiap kelompok masyarakat, untuk mengejar ketertinggalan pendapatan masyarakat kelompok miskin dan menengah (Tan, 2010). Namun yang sering terjadi, kemajuan pembangunan ekonomi terkadang menimbulkan perbedaan tingkat kesejahteraan melalui distribusi pendapatan yang tidak merata. Beberapa penelitian menunjukkan kesamaan kurva Kuznets dan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan (Mustika, Nurjanah, & W.B, 2023).

Di negara yang sedang berkembang, ketimpangan pendapatan antar wilayah sering terjadi dan merupakan masalah klasik dalam desain pembangunan. Agar ketimpangan ini tidak menimbulkan masalah dalam pembangunan, fenomena ketimpangan pendapatan antar wilayah ini harus dikenali dan dikelola dengan benar. Ini karena ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan masalah seperti kecemburuan sosial, arus urbanisasi, tingkat kriminal, dan penurunan kualitas hidup di kota dan desa. Oleh karena itu, desain pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga ukuran pemerataan distribusi. Pemerintah daerah harus membuat kebijakan pembangunan wilayah untuk mengurangi disparitas ekonomi. Pentingnya pemerataan tidak hanya untuk keadilan sosial, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dalam jangka panjang. Ketimpangan yang terlalu besar dapat

mengakibatkan ketegangan sosial, ketidakstabilan politik, dan ketidaksetaraan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pulau Jawa dan Pulau Sumatera merupakan pulau-pulau di Indonesia yang terletak di bagian barat dan memiliki tingkat populasi penduduk yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia Tengah dan Timur. sebagai pusat pemerintahan pembangunan di pulau jawa sangat maju dan cepat dibandingkan pulau lainnya, termasuk jika dibandingkan dengan Pulau Sumatera. Meskipun Pulau Jawa telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dominan, dengan munculnya berbagai pusat industri dan aktivitas ekonomi yang menggeliat, Pulau Sumatera menarik perhatian karena perbandingan yang menarik terkait ketimpangan pendapatannya. Dengan pertumbuhan ekonomi yang impresif, sering kali diidentifikasi dengan kemajuan ekonomi nasional, perhatian khusus diberikan pada Pulau Sumatera karena dinamika ketimpangan pendapatannya yang menarik. Fakta bahwa Pulau Sumatera menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang lebih rendah daripada Pulau Jawa memberikan titik fokus yang menarik untuk penelitian lebih lanjut. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan (Mustika, Nurjanah, & W.B, 2023) menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan rata-rata di Pulau Sumatera sebesar 0,327, yang secara signifikan lebih rendah daripada Pulau Jawa yang mencapai 0,393. Fenomena ini memberikan tantangan menarik untuk dipelajari lebih dalam.

Pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat sudah seharusnya diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran dan pemerataan kesejahteraan. Menurut Breunig dan Majeed seperti yang diungkapkan dalam (Maurilla, Suriani, & Nasir, 2022) menyoroti bahwa daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, cenderung mengalami ketimpangan pendapatan yang berdampak negatif pada pertumbuhan

ekonomi. Menurut Wang dalam (Maurilla, Suriani, & Nasir, 2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan efisiensi dapat mengakibatkan peningkatan tajam dalam ketimpangan secara keseluruhan, serta meningkatkan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, sektor utama yang menjadi fokus pertumbuhan di suatu daerah diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui penciptaan peluang kerja baru yang dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meratakan distribusi pendapatan. Hal tersebut seperti yang dilandasi pada teori *trickle down effect* (dampak tetesan ke bawah- kemakmuran) yang dikembangkan pertama kali oleh Hirschman (1954). Teori *trickle down effect* menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang padagilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata. *Trickle Down Effect* merupakan salah satu pendekatan dalam strategi tidak langsung pembangunan ekonomi untuk pemeratakan kesejahteraan yang menekankan pada munculnya pertumbuhan ekonomi. Dikatakan tidak langsung karena proses pemerataan kesejahteraan dilakukan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi pada sektor utama dan kemudian sektor utama tersebut akan menyebarkan hasil pertumbuhan ekonomi tersebut ke sektor lainnya. Dengan adanya proses penyebaran tersebut diharapkan akan membawa perbaikan kesejahteraan masyarakat (Larasati & Fadli, 2017).

Walaupun terdapat bukti empiris yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi ketimpangan pendapatan, namun lebih banyak bukti yang menunjukkan bahwa faktor utama dalam penentuan distribusi pendapatan adalah struktur ekonomi dan bukan tingkat atau laju

pertumbuhan ekonomi (Restiatun, 2009). Adapun perkembangan Ketimpangan Pendapatan menurut Provinsi di Pulau Sumatera dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah di Pulau Sumatera Tahun 2013-2022**

Provinsi	Tahun									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	0.331	0.337	0.339	0.341	0.329	0.318	0.321	0.319	0.323	0.291
Sumatera Utara	0.328	0.31	0.326	0.312	0.335	0.311	0.315	0.314	0.313	0.326
Sumatera Barat	0.351	0.332	0.319	0.312	0.312	0.305	0.307	0.301	0.3	0.292
Riau	0.393	0.379	0.366	0.347	0.325	0.347	0.331	0.321	0.327	0.323
Jambi	0.327	0.342	0.344	0.346	0.334	0.335	0.324	0.316	0.315	0.335
Sumatera Selatan	0.375	0.381	0.334	0.362	0.365	0.341	0.339	0.338	0.34	0.33
Bengkulu	0.372	0.355	0.371	0.354	0.349	0.355	0.329	0.323	0.321	0.315
Lampung	0.356	0.331	0.352	0.358	0.333	0.326	0.331	0.32	0.314	0.313
Kep. Bangka Belitung	0.313	0.307	0.295	0.283	0.273	0.288	0.282	0.279	0.272	0.269
Kep. Riau	0.362	0.367	0.437	0.364	0.361	0.352	0.334	0.332	0.339	0.341
<b>Rata-rata (Sumatera)</b>	<b>0.351</b>	<b>0.344</b>	<b>0.348</b>	<b>0.338</b>	<b>0.332</b>	<b>0.328</b>	<b>0.321</b>	<b>0.316</b>	<b>0.316</b>	<b>0.314</b>
<b>Rata-rata (Indonesia)</b>	<b>0.413</b>	<b>0.406</b>	<b>0.408</b>	<b>0.397</b>	<b>0.393</b>	<b>0.389</b>	<b>0.382</b>	<b>0.381</b>	<b>0.384</b>	<b>0.384</b>

Sumber : BPS Indonesia

Berdasarkan tabel 1.1 Gini Ratio menurut provinsi dan daerah di Provinsi Pulau Sumatera dari tahun 2013 hingga 2022 mengungkapkan pola dan tren ketimpangan pendapatan yang beragam. Gini Ratio, yang merupakan ukuran ketimpangan pendapatan, menunjukkan variasi yang signifikan antara provinsi-provinsi, dengan beberapa provinsi mencatat tingkat ketimpangan yang lebih rendah daripada yang lain. Misalnya, Aceh memiliki Gini Ratio terendah pada tahun 2022 (0.291), menandakan tingkat kesetaraan yang lebih tinggi dalam distribusi pendapatan, sementara Kepulauan Riau memiliki Gini Ratio tertinggi pada tahun yang sama (0.341), menandakan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, sebagian besar provinsi di Pulau Sumatera mengalami

penurunan Gini Ratio dari tahun ke tahun, yang menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi kesenjangan pendapatan.

Ketimpangan pendapatan disebabkan oleh berbagai faktor kompleks yang melibatkan banyak aspek ekonomi, sosial, dan geografis. Beberapa faktor seperti sumber daya alam yang melimpah, lokasi geografis yang strategis dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi dapat menjadi keunggulan komparatif suatu daerah atau negara dalam meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, penting untuk diingat bahwa keunggulan tersebut juga dapat berpotensi menjadi sumber ketimpangan jika tidak dikelola dengan bijaksana.

Terlihat bahwa setiap wilayah memiliki ciri khas yang beragam dengan ciri khas yang saling berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Menandakan bahwa masing-masing wilayah memiliki keunikan dalam aspek-aspek tertentu, seperti ekonomi, budaya, dan geografi yang membedakannya dari wilayah lain. Faktor-faktor ini menciptakan keragaman yang khas dalam pengembangan wilayah-wilayah tersebut, yang bisa memengaruhi perkembangan ekonomi, sosial, dan politik di setiap wilayah. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk memahami perbedaan ini dan merancang strategi pembangunan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan dan potensi unik setiap wilayah. Perbedaan karakteristik wilayah diantaranya disebabkan oleh aspek topografis, kualitas sumber daya alam, sumber daya manusia, akumulasi modal dan kemajuan teknologi (Rahardjo, 2013).

Menurut (Sjafrizal, 2013), Kondisi demografis yang dimaksud di sini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur penduduk, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, dan perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki

masyarakat daerah bersangkutan. Menurut Supriyantoro (2005) dalam (Aufa Nadya, 2019) ketimpangan memang tidak dapat dihilangkan tetapi bisa dikurangi hingga pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut terpelihara dalam proses pertumbuhannya.

Menurut *World Bank* (2015), terdapat empat penyebab ketimpangan di Indonesia, yaitu pertama adanya ketimpangan peluang yang dirasakan oleh keluarga miskin karena dari awal tidak adanya kesempatan adil dalam hidup. Kedua, tidak meratanya pekerjaan, pekerja yang memiliki keterampilan lebih akan mendapatkan gaji lebih tinggi. Tidak adanya keterampilan membuat pekerja terjebak dalam pekerja informal dengan produktivitas yang rendah. Ketiga, perbedaan konsentrasi kekayaan. Masyarakat yang memiliki banyak asset akan mendorong ketimpangan saat ini atau masa yang akan datang. Keempat, saat terjadi guncangan, dampak yang terjadi akan lebih terasa pada masyarakat miskin dan akhirnya kemampuan untuk mendapatkan pendapatan akan menurun (Yoertiara, 2022).

Perhatian terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi esensial karena kualitas SDM memiliki peran yang krusial dalam menentukan kesuksesan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Semakin unggul kualitas SDM suatu wilayah, semakin besar potensi keberhasilan pembangunan ekonominya. Semakin tinggi kualitas SDM di suatu wilayah dan semakin produktifnya wilayah tersebut, maka hal ini akan mendorong peningkatan aktivitas usaha dan merangsang investasi. Ini pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan, menciptakan putaran investasi yang berkelanjutan, dan menghasilkan efek domino. Dengan peningkatan aktivitas usaha dan investasi, kebutuhan akan pelayanan publik juga akan meningkat.

Kualitas SDM dapat mempengaruhi akses individu ke pendidikan dan pelatihan. Individu dengan kualitas SDM yang rendah cenderung akan kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas dan pelatihan pekerjaan yang dapat meningkatkan keterampilan mereka. Hal ini mengakibatkan rendahnya mobilitas sosial dan dapat berkontribusi pada ketimpangan pendapatan. Individu dengan kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang lebih tinggi cenderung memiliki akses ke pekerjaan yang lebih berkualitas dan berupah lebih tinggi, sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan karena individu dengan kualifikasi yang lebih rendah mungkin hanya dapat mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih rendah.

Untuk menilai kualitas SDM di suatu wilayah, kita mempertimbangkan tiga aspek utama: tingkat pendidikan, kondisi kesehatan, dan keadaan ketenagakerjaan. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM didasarkan pada gagasan bahwa pendidikan bukan hanya untuk persiapan individu memasuki dunia kerja, tetapi lebih luas daripada itu. Sementara itu, kesehatan dianggap sebagai fenomena ekonomi yang dapat dinilai baik dari perspektif stok maupun sebagai investasi. Dalam konteks ini, kesehatan menjadi variabel yang penting yang dapat dianggap sebagai faktor produksi yang berkontribusi pada peningkatan nilai tambah barang dan jasa. Selain itu, kesehatan juga merupakan tujuan yang diinginkan oleh individu, rumah tangga, dan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan mereka. Kesehatan dipandang sebagai modal yang berpotensi memberikan pengembalian positif, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di suatu wilayah merupakan langkah penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan individu serta masyarakat.

Adapun perkembangan Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi di Provinsi Pulau Sumatera dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2013-2022**

Provinsi	Tahun									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	68.3	68.81	69.45	70	70.6	71.19	71.9	71.99	72.18	72.8
Sumatera Utara	68.36	68.87	69.51	70	70.57	71.18	71.74	71.77	72	72.71
Sumatera Barat	68.91	69.36	69.98	70.73	71.24	71.73	72.39	72.38	72.65	73.26
Riau	69.91	70.33	70.84	71.2	71.79	72.44	73	72.71	72.94	73.52
Jambi	67.76	68.24	68.89	69.62	69.99	70.65	71.26	71.29	71.63	72.14
Sumatera Selatan	66.16	66.75	67.46	68.24	68.86	69.39	70.02	70.01	70.24	70.9
Bengkulu	67.5	68.06	68.59	69.33	69.95	70.64	71.21	71.4	71.64	72.16
Lampung	65.73	66.42	66.95	67.65	68.25	69.02	69.57	69.69	69.9	70.45
Kep. Bangka Belitung	67.92	68.27	69.05	69.55	69.99	70.67	71.3	71.47	71.69	72.24
Kep. Riau	73.02	73.4	73.75	73.99	74.45	74.84	75.48	75.59	75.79	76.46
<b>Rata-rata (Sumatera)</b>	<b>68.357</b>	<b>68.851</b>	<b>69.447</b>	<b>70.031</b>	<b>70.569</b>	<b>71.175</b>	<b>71.787</b>	<b>71.83</b>	<b>72.066</b>	<b>72.664</b>
<b>Rata-rata (Indonesia)</b>	<b>68.31</b>	<b>68.9</b>	<b>69.55</b>	<b>70.18</b>	<b>70.81</b>	<b>71.39</b>	<b>71.92</b>	<b>71.94</b>	<b>72.29</b>	<b>72.91</b>

Sumber : BPS Indonesia

Berdasarkan Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2013 hingga 2022 menggambarkan peningkatan bertahap dalam kesejahteraan manusia di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, setiap provinsi di Pulau Sumatera menunjukkan tren peningkatan IPM selama periode yang diamati. Provinsi Kepulauan Riau menonjol sebagai provinsi dengan IPM tertinggi pada tahun 2022 (76.46), sementara Provinsi Lampung mencatat IPM terendah pada tahun yang sama (70.45). Adopsi kebijakan pembangunan yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan standar hidup telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan IPM di seluruh provinsi Pulau Sumatera. Selain itu, rata-rata IPM di Pulau Sumatera (72.664 pada tahun 2022) sedikit di atas rata-rata nasional (72.91 pada tahun yang sama), menandakan kemajuan yang positif dalam pencapaian kesejahteraan

manusia di wilayah tersebut. Meskipun demikian, perbedaan dalam tingkat IPM antar provinsi menunjukkan pentingnya konteks lokal dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah.

Selanjutnya, salah satu masalah utama dalam ketidaksetaraan pendapatan antara kelompok masyarakat dalam suatu wilayah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Masalah distribusi pendapatan juga terkait dengan akses terhadap lapangan kerja yang layak. Beberapa daerah di Pulau Sumatera mungkin memiliki kesempatan kerja yang terbatas, terutama di sektor formal, yang dapat memengaruhi pendapatan penduduknya. TPT mencerminkan jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan aktif mencari pekerjaan. Tingginya TPT dapat mengindikasikan ketidakmerataan dalam kesempatan kerja dan pembangunan ekonomi. Ketimpangan dalam tingkat pengangguran dapat menciptakan disparitas sosial dan ekonomi yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan dan tindakan untuk mengurangi TPT menjadi aspek penting dalam mencapai pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di suatu wilayah, yang pada gilirannya dapat membantu mengatasi ketimpangan pendapatan yang ada.

Pemantauan TPT memungkinkan pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian khusus dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan. Ini dapat mengarah pada pengembangan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan peluang kerja dan pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut. Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti pengentasan kemiskinan dan kesetaraan ekonomi, seringkali terkait erat dengan pengurangan TPT. Oleh karena itu,

pemantauan TPT merupakan bagian integral dalam upaya mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Adapun perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen) di Pulau Sumatera Tahun 2013-2022 dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut :

**Tabel 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen) di Pulau Sumatera Tahun 2013-2022**

Provinsi	Tahun									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	8.34	6.75	7.73	8.13	7.39	6.54	5.48	5.4	6.3	5.97
Sumatera Utara	6.09	5.95	6.39	6.49	6.41	5.61	5.57	4.71	6.01	5.47
Sumatera Barat	6.39	6.32	5.99	5.81	5.8	5.68	5.38	5.25	6.67	6.17
Riau	4.19	4.99	6.72	5.94	5.76	5.55	5.36	4.92	4.96	4.4
Jambi	2.89	2.5	2.73	4.66	3.67	3.56	3.52	4.26	4.76	4.7
Sumatera Selatan	5.41	3.84	5.03	3.94	3.8	4.08	4.02	3.9	5.17	4.74
Bengkulu	2.1	1.62	3.21	3.84	2.81	2.63	2.41	3.08	3.72	3.39
Lampung	5.07	5.08	3.44	4.54	4.43	4.32	3.95	4.26	4.54	4.31
Kep. Bangka Belitung	3.22	2.67	3.35	6.17	4.46	3.59	3.32	3.35	5.04	4.18
Kep. Riau	6.05	5.26	9.05	9.03	6.44	7.3	7.02	5.98	10.12	8.02

Sumber : BPS Indonesia

Berdasarkan Tabel 1.3 data tersebut menggambarkan tingkat pengangguran terbuka (dalam persen) di Pulau Sumatera dari tahun 2013 hingga 2022. Secara umum, terdapat variasi dalam tingkat pengangguran antarprovinsi selama periode tersebut. Aceh, misalnya, menunjukkan penurunan yang signifikan dalam tingkat pengangguran dari tahun 2013 hingga 2019, meskipun mengalami sedikit peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Sumatera Utara juga menunjukkan tren penurunan yang relatif stabil sepanjang periode, dengan fluktuasi kecil di antara tahun-tahunnya. Di sisi lain, provinsi-provinsi seperti Jambi dan Bengkulu menunjukkan tingkat pengangguran yang relatif rendah, meskipun dengan fluktuasi kecil dari tahun ke tahun. Kepulauan Riau, sebaliknya, menunjukkan fluktuasi yang cukup besar, terutama dengan lonjakan signifikan pada tahun 2015 dan 2016, sebelum mengalami penurunan yang cukup tajam pada

tahun 2017 dan 2018, dan kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Variabilitas ini mencerminkan faktor-faktor ekonomi dan sosial yang kompleks di masing-masing provinsi, termasuk pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, dan kebijakan pemerintah.

Selain aspek kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perlu juga memerhatikan pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan memiliki dampak positif terhadap pengurangan ketimpangan yang terjadi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang kuat diharapkan dapat memacu penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendukung pembangunan infrastruktur serta layanan publik. Dalam konteks ini, fokus pada pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dapat menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Dengan mengatasi fluktuasi ekonomi dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dapat diharapkan tercipta kesempatan yang lebih besar bagi semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari perkembangan ekonomi yang positif. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor kunci dalam menentukan disparitas pendapatan. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara teoritis dapat meningkatkan pendapatan secara keseluruhan, namun tanpa distribusi yang adil, disparitas pendapatan dapat semakin melebar. Adapun perkembangan Laju PDRB Menurut Provinsi (Persen) di Provinsi Pulau Sumatera dapat dilihat pada tabel 1.4 sebagai berikut :

**Tabel 1.4 Laju PDRB Menurut Provinsi (Persen) di Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2013-2022**

Provinsi	Tahun									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	2.61	1.55	-0.73	3.3	4.18	4.61	4.15	-0.37	2.79	4.21
Sumatera Utara	6.07	5.23	5.1	5.18	5.12	5.18	5.22	-1.07	2.61	4.73
Sumatera Barat	6.08	5.88	5.53	5.27	5.3	5.16	5.05	-1.61	3.29	4.36
Riau	2.48	2.71	0.22	2.23	2.66	2.37	2.84	-1.13	3.36	4.55
Jambi	6.84	7.36	4.21	4.37	4.6	4.74	4.4	-0.51	3.69	5.13
Sumatera Selatan	5.31	4.79	4.42	5.04	5.51	6.04	5.71	-0.11	3.58	5.23
Bengkulu	6.07	5.48	5.13	5.29	4.98	4.99	4.96	-0.02	3.27	4.31
Lampung	5.77	5.08	5.13	5.15	5.16	5.25	5.27	-1.66	2.77	4.28
Kep. Bangka Belitung	5.2	4.67	4.08	4.11	4.47	4.46	3.32	-2.29	5.05	4.4
Kep. Riau	7.21	6.6	6.02	5.02	1.98	4.58	4.89	-3.8	3.43	5.09
<b>Rata-rata (Sumatera)</b>	<b>5.364</b>	<b>4.935</b>	<b>3.911</b>	<b>4.496</b>	<b>4.396</b>	<b>4.738</b>	<b>4.581</b>	<b>-1.257</b>	<b>3.384</b>	<b>4.629</b>
<b>Rata-rata (Indonesia)</b>	<b>5.56</b>	<b>5.21</b>	<b>4.99</b>	<b>5.16</b>	<b>5.23</b>	<b>5.32</b>	<b>5</b>	<b>-2.07</b>	<b>3.7</b>	<b>5.31</b>

Sumber : BPS Indonesia

Berdasarkan Tabel 1.4 laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2013 hingga 2022 mengungkapkan variasi yang signifikan antara daerah-daerah tersebut. Meskipun sebagian besar provinsi menunjukkan tren peningkatan laju PDRB dari tahun ke tahun, terdapat fluktuasi yang cukup signifikan antar tahun dan provinsi. Contohnya, Sumatera Utara mencatat laju PDRB tertinggi pada tahun 2013 (6.45%), sementara Sumatera Barat mencatat laju PDRB terendah pada tahun yang sama (6.31%). Jambi adalah salah satu provinsi yang mencatat peningkatan stabil dan signifikan dalam laju PDRB selama periode yang diamati. Meskipun rata-rata laju PDRB Pulau Sumatera (4.629% pada tahun 2022) hampir sejajar dengan rata-rata nasional (5.31% pada tahun yang sama), perbedaan dalam laju pertumbuhan ekonomi antar provinsi menunjukkan kompleksitas dinamika ekonomi regional. Faktor-faktor seperti investasi, pertumbuhan industri, infrastruktur, dan kebijakan ekonomi memainkan peran penting dalam penentuan laju PDRB setiap provinsi.

Data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan Gini Ratio di Pulau Sumatera selama periode 2013-2022 menggambarkan suatu fenomena yang perlu dicermati. Terlihat bahwa beberapa provinsi mengalami peningkatan signifikan dalam PDRB, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun, yang menarik adalah bahwa peningkatan PDRB tersebut tidak selalu diikuti oleh penurunan tingkat ketimpangan pendapatan yang tercermin dalam Gini Ratio. Sebagai contoh, Provinsi Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi menunjukkan tren di mana meskipun PDRB meningkat, Gini Ratio tetap tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa, meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, manfaatnya belum merata di antara masyarakat. Mungkin ada segmen atau kelompok penduduk tertentu yang mendapatkan manfaat lebih besar dari pertumbuhan tersebut, meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan data yang ada, fenomena ketimpangan antara pertumbuhan PDRB dan Gini Ratio terutama terlihat pada rentang tahun 2013 hingga 2018. Dalam periode tersebut, sejumlah provinsi di Pulau Sumatera mencatat peningkatan PDRB yang signifikan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, di saat yang sama, Gini Ratio mencerminkan ketimpangan pendapatan yang tidak selalu menunjukkan penurunan seiring dengan pertumbuhan PDRB. Sebagai contoh, Provinsi Riau pada tahun 2013 mencatat Gini Ratio sebesar 0.383, tetapi pada tahun 2018, meskipun PDRB terus meningkat, Gini Ratio hanya turun sedikit menjadi 0.347. Fenomena serupa juga dapat diamati pada beberapa provinsi lainnya seperti Sumatera Selatan dan Jambi. Provinsi Jambi mencatat peningkatan PDRB yang signifikan, tetapi Gini Ratio-nya menunjukkan fluktuasi yang tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Provinsi-provinsi ini mencerminkan fenomena di mana keuntungan dari

pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya merata di seluruh lapisan masyarakat, dan sejumlah provinsi masih menghadapi tantangan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Perubahan tersebut menyoroti bahwa pada periode tertentu, pertumbuhan ekonomi yang kuat belum mampu secara signifikan mengurangi ketimpangan pendapatan di beberapa provinsi Pulau Sumatera. Pada tahun-tahun tersebut, distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi tidak merata di antara seluruh lapisan masyarakat dan sejumlah provinsi masih menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan dampak inklusif.

Meskipun peningkatan PDRB di berbagai provinsi di Pulau Sumatera cenderung naik, pada kenyataannya hal ini tidak selalu berarti bahwa ketimpangan pendapatan secara otomatis menurun. Fenomena ini terlihat ketika kita melihat data secara lebih mendalam. Dalam beberapa provinsi, peningkatan PDRB mungkin dipicu oleh sektor-sektor tertentu yang tumbuh pesat, seperti industri atau pertanian. Namun, peningkatan ini tidak selalu mencerminkan peningkatan pendapatan yang merata di seluruh populasi. Beberapa wilayah mungkin mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sementara sebagian lainnya mungkin tertinggal.

Beberapa literatur menjelaskan bahwa terdapatnya perbedaan pembangunan ekonomi antarwilayah dapat menyebabkan perubahan ketimpangan di suatu daerah (Sukwika, 2018). Peningkatan infrastruktur merupakan salah satu komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Meningkatkan fasilitas infrastruktur dapat menjadi langkah strategis dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mencapai pemerataan di Indonesia. Dengan adanya fasilitas yang baik hal ini dapat menurunkan

tingkatkemiskinan dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Panjang jalan yang terbentang di suatu wilayah sering dianggap sebagai indikator utama dalam mengevaluasi tingkat infrastruktur yang ada. Jumlah jalan yang baik dan terkoneksi dengan baik dapat mencerminkan tingkat aksesibilitas, konektivitas, dan kemajuan ekonomi suatu wilayah. Semakin panjang jaringan jalan yang tersedia, semakin baik pula potensi untuk mengakses layanan publik, pasar, serta kesempatan ekonomi dan sosial lainnya. Oleh karena itu, panjang jalan sering menjadi tolok ukur penting dalam menilai tingkat pengembangan infrastruktur suatu daerah. Adapun perkembangan Panjang Jalan Menurut Provinsi dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km) di Provinsi Pulau Sumatera dapat dilihat pada tabel 1.5 sebagai berikut :

**Tabel 1.5 Panjang Jalan Menurut Provinsi dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km) di Pulau Sumatera Tahun 2013-2022**

Provinsi	Tahun									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	22,656	23,472	23,533	22,810	24,019	23,915	23,897	23,632	23,650	23,660
Sumatera Utara	36,697	37,476	37,544	40,773	39,543	39,115	40,388	40,956	40,739	40,765
Sumatera Barat	22,654	23,464	23,517	23,434	22,556	22,388	22,351	22,323	22,649	20,999
Riau	24,530	26,347	26,347	27,040	24,992	24,497	24,320	24,115	24,293	24,206
Jambi	13,071	14,211	14,211	13,731	13,027	13,092	13,126	13,131	13,141	13,202
Sumatera Selatan	16,911	17,789	17,790	18,821	19,233	18,989	19,175	19,606	19,606	19,587
Bengkulu	8,341	8,686	8,686	9,237	9,196	9,239	9,239	9,191	9,191	9,228
Lampung	19,439	19,189	19,189	21,162	21,044	20,759	20,759	20,715	20,759	20,765
Kep. Bangka Belitung	4,913	5,397	5,397	5,433	5,485	5,418	5,418	5,418	5,783	5,891
Kep. Riau	4,780	5,632	5,632	5,552	5,686	5,686	5,686	5,686	5,686	5,688
<b>Total (Sumatera)</b>	<b>173,992</b>	<b>181,663</b>	<b>181,846</b>	<b>187,993</b>	<b>184,781</b>	<b>183,098</b>	<b>184,359</b>	<b>184,773</b>	<b>185,497</b>	<b>183,991</b>
<b>Total (Indonesia)</b>	<b>501,969</b>	<b>517,753</b>	<b>518,153</b>	<b>537,837</b>	<b>540,490</b>	<b>540,252</b>	<b>542,160</b>	<b>545,155</b>	<b>546,624</b>	<b>546,725</b>

Sumber : BPS Indonesia

Berdasarkan Tabel 1.5 Panjang Jalan Menurut Provinsi dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km) di Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2013-2022 menunjukkan peningkatan bertahap dalam infrastruktur jalan di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, terjadi peningkatan panjang jalan di setiap provinsi Sumatera selama periode yang diamati. Provinsi Sumatera Utara memperlihatkan peningkatan signifikan dalam panjang jalan pada tahun 2022 (40,765 km), sementara Provinsi Sumatera Barat mencatat penurunan pada tahun yang sama (20,999 km). Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor seperti pembangunan baru, perawatan dan pemeliharaan jalan, serta perubahan dalam alokasi anggaran infrastruktur di masing-masing provinsi. Meskipun demikian, total panjang jalan di Pulau Sumatera pada tahun 2022 (183,991 km) menunjukkan peningkatan yang konsisten seiring berjalannya waktu. Dalam konteks tingkat kewenangan pemerintahan, perhatian terhadap pembangunan infrastruktur jalan juga tercermin dalam peningkatan panjang jalan di kedua tingkat kewenangan pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. ini.

Teknologi merupakan hal penting dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Pada negara-negara Eropa dengan ketimpangan yang cukup tinggi, teknologi menjadi perhatian negara-negara dalam mengurangi ketimpangan (Kharlamova, Stavytskyy, & Zarotiadis, 2018). Perkembangan TIK mengakibatkan sharing economy yang dapat diperoleh dari berbagai media menjadi lebih mudah sehingga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh elemen untuk terlibat aktif dalam aktivitas ekonomi. Todaro & Smith (2006) menyatakan bahwa penggunaan teknologi tepat guna serta pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu cara untuk menekan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Adapun perkembangan Perkembangan IP-TIK Antar Provinsi di Pulau Sumatera dapat dilihat pada tabel 1.6 sebagai berikut :

**Tabel 1.6 Perkembangan IP-TIK Antar Provinsi di Pulau Sumatera Periode Tahun 2013 – 2022**

Provinsi										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	3.87	3.92	3.98	3.41	3.39	3.66	3.89	3.27	3.54	3.60
Sumatera Utara	4.11	4.12	4.13	4.14	4.15	4.16	4.17	4.17	4.35	4.17
Sumatera Barat	4.17	4.51	4.76	4.77	4.79	4.80	4.67	4.68	4.70	4.77
Riau	4.40	4.49	4.95	4.26	4.08	5.25	5.33	5.74	5.90	6.02
Jambi	4.23	4.22	3.70	3.92	4.66	4.91	5.16	5.49	5.73	5.80
Sumatera Selatan	4.03	4.17	3.46	3.80	4.63	4.81	4.90	5.30	5.64	5.76
Bengkulu	4.26	4.38	3.72	3.93	4.78	4.88	5.20	5.50	5.85	5.95
Lampung	3.62	3.67	3.01	3.32	4.20	4.50	4.82	5.15	5.58	5.63
Kep. Bangka Belitung	4.09	4.13	3.70	4.00	4.70	4.89	5.24	5.54	5.71	5.82
Kep. Riau	6.46	6.30	5.15	5.59	5.89	6.14	6.39	6.46	6.58	6.69

Sumber : BPS Indonesia

Berdasarkan Tabel 1.6 Perkembangan IP-TIK Antar Provinsi di Pulau Sumatera Periode Tahun 2013 – 2022 menunjukkan variasi yang signifikan baik antar provinsi maupun dalam setiap provinsi dari tahun ke tahun. Secara umum, semua provinsi mengalami peningkatan dalam IP-TIK selama periode ini, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang bervariasi. Provinsi Kepulauan Riau secara konsisten menunjukkan IP-TIK tertinggi, mulai dari 6.46 pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 6.69 pada tahun 2022, menandakan posisi dominan dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Sumatera. Provinsi Riau juga mengalami pertumbuhan yang signifikan dari 4.40 pada tahun 2013 menjadi 6.02 pada tahun 2022, dengan lonjakan besar terlihat pada tahun 2018 dan seterusnya.

Provinsi Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung juga menunjukkan tren peningkatan yang kuat. Jambi, misalnya, meningkat dari 4.23 pada tahun 2013 menjadi 5.80 pada tahun 2022, dengan peningkatan yang cukup stabil setelah tahun 2016. Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung mengikuti pola serupa dengan peningkatan yang konsisten, masing-masing mencapai 5.95

dan 5.82 pada tahun 2022. Sumatera Barat dan Sumatera Utara memiliki tren peningkatan yang lebih moderat. Sumatera Barat, yang memulai dari 4.17 pada tahun 2013, mencapai 4.77 pada tahun 2022 dengan peningkatan yang relatif stabil. Sumatera Utara menunjukkan peningkatan yang lebih lambat tetapi konsisten dari 4.11 pada tahun 2013 menjadi 4.17 pada tahun 2022, dengan puncaknya pada 4.35 di tahun 2021. Provinsi Aceh memiliki dinamika yang paling fluktuatif dengan penurunan pada beberapa tahun, seperti dari 3.98 pada tahun 2015 menjadi 3.41 pada tahun 2016, namun kembali meningkat hingga mencapai 3.60 pada tahun 2022.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun ada variasi dalam laju perkembangan antar provinsi, ada tren peningkatan yang jelas dalam IP-TIK di seluruh Pulau Sumatera selama periode 2013-2022. Provinsi dengan pertumbuhan yang lebih stabil dan cepat cenderung berada di wilayah pesisir dan pusat ekonomi utama, yang mungkin mencerminkan akses yang lebih baik terhadap infrastruktur teknologi dan investasi yang lebih besar dalam sektor ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka peneliti bermaksud mengajukan judul, “Studi Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Sumatera”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pentingnya pertumbuhan ekonomi tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata. Dalam konteks pembangunan regional, pertumbuhan ekonomi yang kuat juga diharapkan dapat menghasilkan dampak positif dalam mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi di dalam wilayah tersebut. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi faktor penting yang memengaruhi ketimpangan pendapatan. Namun, selain kedua faktor ini, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Infrastruktur dan TIK juga

memiliki peran krusial dalam menentukan sejauh mana ketimpangan pendapatan dapat diminimalkan. Berdasarkan pada konsep serta permasalahan yang dihadapi, maka pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi tingkat ketimpangan Pendapatan, gambaran kualitas SDM, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Infrastruktur dan TIK di Pulau Sumatera.
2. Bagaimana pengaruh kualitas SDM, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Infrastruktur dan TIK mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan utama dari kajian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kondisi tingkat ketimpangan pendapatan, gambaran kualitas SDM, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Infrastruktur dan TIK di Pulau Sumatera
2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas SDM, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Infrastruktur dan TIK mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis
  - a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini Hasil penelitian akan memperkaya literatur akademis dalam bidang perencanaan pembangunan, khususnya dalam konteks Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam mengembangkan dan memperbaiki Studi Ketimpangan Pendapatab di Pulau Sumatera.

## 2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam mengembangkan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan dalam mengatasi Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera.
- b. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan terkait upaya menurunkan Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera.